



LAPORAN PENGADUAN

REKOMENDASI DAN TEMUAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL APIP TAHUN 2025

PUSAT PENERANGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

**Rekomendasi dan Temuan Hasil Pengawasan Internal APIP
Tahun 2025**

Audit Kinerja dan Ketaatan Lingkup Kemendagri dan BNPP Tahun 2025

Pada Tahun 2025 Inspektorat Jenderal akan melakukan Pemeriksaan di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan BNPP. Sampai dengan tanggal 19 September 2025, Tim Pemeriksa saat ini melaksanakan pengawasan pada 3 (tiga) Satuan kerja, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Selanjutnya, pengawasan terhadap satuan kerja lainnya masih dalam proses penjadwalan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Jenderal Kemendagri dalam hal ini melaksanakan tindak lanjut setiap pengaduan masyarakat yang merupakan laporan dari masyarakat terkait dengan adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah pusat dan atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai contohnya yaitu berupa penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelanggaran disiplin pegawai.

Dari hasil pengadministrasian surat pengaduan masyarakat yang diterima Inspektorat Jenderal Kemendagri sejak tahun 2023 s.d. 2054. Hasil inventarisasi pengelolaan pengaduan selama 2023 s.d 2025 (per tanggal 10 September 2025) sebanyak 1.701 (seribu tujuh ratus satu) pengaduan. Sebanyak 1.701 pengaduan dimaksud, telah diverifikasi untuk dilakukan penanganan dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1. Jumlah Pengaduan Tahun 2025 : 576 pengaduan**
 - a. Jenis Pengaduan terdiri dari:
 - 1) Pengaduan Berkadar Pengawasan: 324
 - a) Penyalahgunaan Wewenang : 69
 - b) Pelanggaran Disiplin Pegawai : 53
 - c) Pelanggaran Administrasi : 170
 - d) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme : 32
 - 2) Pengaduan Berkadar Tidak Pengawasan : 252
 - b. Laporan Penindakan terdiri dari:
 - 1) Selesai :
 - a) LHP/ LHK : 165
 - b) Pelimpahan : 22
 - c) Arsip : 165
 - 2) Proses : 72
 - 3) Belum Telaah : 317